

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Pertanyakan Proyek Jalur Sepeda

Gambir, Warta Kota

Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mencecar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Dewan mempertanyakan rencana pembangunan jalur sepeda tahun 2020 yang diusulkan dinas mencapai Rp 69,271 miliar.

Angka ini naik 10 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya dengan anggaran Rp 4,49 miliar. "Soal masalah jalur sepeda, apakah ada kebutuhan khusus yang membuat pemerintah bahwa jalur itu diperlukan dari alokasi Rp 4 miliar menjadi hampir Rp 70 miliar?" ujar Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, Senin (28/10).

Hal itu diungkapkan Pandapotan saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 antara Dinas Perhubungan dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta. "Di mana urgensinya, kalau saya lihat tidak ada. Bagaimana dengan teman-teman yang lain?," tanya Pandapotan.

Anggota Komisi B, Manuara Siahaan lalu mempertanyakan master plan atau rencana induk usulan Dinas Perhubungan terkait pembangunan jalur sepeda. Lantaran Syafrin tidak bisa menunjukkan master plan yang diminta, Manuara meminta kepada pimpinan untuk menunda persetujuan usulan anggaran jalur sepeda senilai Rp 69,271 miliar.

Satu kesatuan

Dinas Perhubungan DKI

Jakarta mengusulkan anggaran pembuatan jalur sepeda di tahun 2020. "Pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway dari Rp 4,49 miliar menjadi Rp 69,27 miliar. Ini adalah untuk pembangunan jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Syafrin mengatakan, pembangunan jalur sepeda tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mengurangi kapasitas jalan. Tetapi, harus dilihat dari satu kesatuan dalam konteks penataan angkutan umum secara masif di Jakarta. "Karena begitu kami membangun infrastruktur transportasi tanpa menyelesaikan persoalan mayor, maka yang terjadi adalah ada infrastruktur transportasi angkutan umum, tetapi penumpangnya tidak," ujar Syafrin. **(faf)**